

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil yang telah kami sajikan, maka dapat disimpulkan

:

- 1) BMT MMU Sidogiri menetapkan PSAK No. 27 dan No. 59 tahun 2007 sebagai standart akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan. Laporan keuangan BMT mengacu pada PSAK No. 27 tentang perkoperasian karena BMT berbadan hukum koperasi. Sehingga laporan keuangan BMT memuat neraca, laporan perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan ditambah dengan laporan penggunaan dana ZIS yang tidak diatur dalam PSAK No. 59 penambahan tersebut dikarenakan BMT adalah lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Meskipun BMT berbadan hukum koperasi tetapi karena dalam operasionalnya menjalankan bisnis keuangan syariah, maka untuk pencatatan dan penyajian akuntansinya menggunakan PSAK No. 59 seperti yang digunakan oleh perbankan syariah. PSAK No. 59 menggambarkan operasional perbankan syariah yang didasarkan pada prinsip syariah Islam.
- 2) PSAK 101 adalah PSAK yang digunakan sebagai acuan transaksi syariah yang terbaru, peneliti merekomendasikan BMT MMU Sidogiri menggunakan PSAK 101 sebagai pedoman transaksi syariahnya.

3) Akuntabilitas BMT Perspektif Syariah, BMT Masalah Mursalah Lil Ummah Sidogiri telah memenuhi dua aspek untuk mengoptimalkan akuntabilitas syariah. Dari aspek Pemenuhan Kebutuhan BMT MMU Sidogiri telah menerapkan PSAK No.27 dan PSAK No.59 tahun 2007 dalam penyajian laporan keuangannya. Aspek pemeriksaan dan pengawasan, yakni pengawasan dan pemeriksaan dari koperasi pusat, auditor independen serta pengawasan dan kepercayaan dari masyarakat sekitar.

1.2 Saran

- a. BMT merupakan lembaga keuangan yang berbadan hukum koperasi dan bisa menjadi BPRS dengan syarat tertentu sebenarnya kurang cocok menggunakan PSAK No. 27 tentang perkoperasian dalam menyajikan laporan keuangan. Akan tetapi tidak mungkin juga menggunakan PSAK No. 59 tentang akuntansi perbankan syariah yang juga berlaku bagi BPRS dikarenakan sumber modal BMT. Untuk itu akan lebih baik bila BMT mempunyai standar sendiri dalam menyajikan laporan keuangan.
- b. Akuntansi syariah mengalir menjadi dua bentuk, yaitu akuntansi syariah praktis dan akuntansi syariah filosofis-teoris. Contoh konkrit dari akuntansi syariah praktis ini adalah PSAK No. 59. Akan tetapi PSAK ini hanya diperuntukkan bagi perbankan syariah sedangkan lembaga syariah non bank memakai standar lain padahal produk lembaga keuangan ini sama. Untuk itu diperlukan bentuk akuntansi syariah yang ideal untuk semua institusi bisnis. Dan sepertinya akuntansi syariah filosofis-teoritis adalah jawabannya.